

KONTRIBUSI SEKTOR UMKM PADA UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Meida Rachmawati¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email : meidaleanptsg@gmail.com

ABSTRAKS

Kemiskinan masih menjadi big issue yang terjadi di hampir seluruh dunia, termasuk negara negara dunia ketiga seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kerangka teoretis kemungkinan penyelesaian problem kemiskinan melalui UMKM. Penelitian ini merupakan kajian pustaka atau studi literatur dengan data – data aktual yang diambil dari sumber kredibel. Data “didialogkan” dengan rujukan teori yang relevan seperti teori lingkaran kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoretik UMKM sangat mungkin sebagai sebuah exit strategi bagi kemiskinan di Indonesia. UMKM mempunyai probabilitas sangat kuat sebagai way out yang representative bagi pengentasan kemiskinan di negeri ini.

Kata kunci : UMKM, Pengentasan , Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is still a big issue that occurs in almost all over the world, including third world countries like Indonesia. This study aims to find a theoretical framework for the possibility of solving the problem of poverty through MSMEs. This research is a literature study or literature study with actual data taken from credible sources. Data is 'dialogued' with references to relevant theories such as the circle of poverty theory. The results show that theoretically MSMEs are very likely as an exit strategy for poverty in Indonesia. MSMEs have very strong probabilities as representative ways out for poverty alleviation in this country.

Keywords: MSME, Eradication, Poverty

PENDAHULUAN

Sebagaimana kaya yang niscaya, miskinpun juga niscaya. Hanya saja keniscayaan untuk kaya, atau untuk miskin inilah yang kemudian dipertanyakan lebih lanjut. Orang orang dalam budaya rajin bekerja dengan dukungan pemerintahan di negaranya yang responsif kualitas kehidupan rakyatnya, maka kaya menjadi niscaya. Berbalikan dengan hal itu adalah kemiskinan, dimana rakyat dengan penduduk berbudaya kontra produktif dengan dukungan pemerintahan yang non responsif isu kualitas hidup secara struktural dan elementer, maka kemiskinan juga menjadi niscaya. Tentu saja kemiskinan menjadi konsep yang didalamnya terkandung variabel – variabel yang memengaruhi, dan kemudian konsep kemiskinan atau definisi kemiskinan seperti apa yang dimaksud.

Konsep kemiskinan bisa dipandang dari beberapa aspek, tergantung pada titik tekan yang tujuan. Pada umumnya, hal –hal yang ditekankan secara mendalam dalam melihat kemiskinan Secara umum yang ditekankan dalam studi kemiskinan adalah pendapatan per kapita yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, pendidikan yang rendah, lahan yang sempit, kurangnya modal, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kekurangan gizi, dan tingkat investasi yang rendah. Pemahaman konsep kemiskinan ini sangat berguna dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ada definisi yang melihat dari aspek makro saja dengan melihat kemiskinan dari sisi rata rata pendapatan perkapita atau dari aspek rumah tangga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) (Sangaji, 2005).

Dalam berbagai literatur kemiskinan dipilah menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dapat dijabarkan sebagai ketidakmampuan seseorang memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan relatif menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu wilayah berada di bawah atau di atas garis kemiskinan. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan relatif dapat diukur dengan melihat proporsi tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Sebagai suatu ukuran kemiskinan relatif dapat berbeda dari satu negara dengan Negara lain, atau dari satu priode dengan periode lain dalam suatu negara (Tambunan, 2001).

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana seseorang berada pada tangga kemiskinan bawah. Mereka yang ada dalam lingkaran kemiskinan absolut tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum atau sekedar untuk bertahan hidup. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen non-makanan yang juga sangat diperlukan untuk *survive*. Seseorang masuk dalam klasifikasi miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatan lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut, atau ketika jumlah pendapatan orang tersebut tidak cukup dipakai memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Walaupun kemiskinan absolut sering juga disebut kemiskinan ekstrim, tetapi maksud dari yang terakhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interpretasi setempat atau kalkulasi. Berbeda dengan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut tidak menggunakan garis kemiskinan sebagai acuan.

KERANGKA TEORI

Konsep Kemisknan

Kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional. Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsep ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan

sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut (Sangaji, 2005).

Menurut UNDP orang miskin adalah mereka yang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya orang-orang ini tidak mempunyai pendapatan. Jika pun mereka mempunyai pendapatan, jumlahnya sangat tidak memadai untuk hidup. Oleh karena itu mereka sangat bergantung pada orang lain untuk bisa hidup sehari-hari. Sedangkan wilayah yang mempunyai banyak penduduk miskin disebut wilayah miskin. Wilayah miskin ditandai oleh pendapatan perkapita yang rendah, produktivitas penduduk yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesenjangan yang tinggi antar yang kaya dan yang miskin. Lebih jauh dari itu penduduk miskin mempunyai akses yang minim terhadap fasilitas kesehatan dan bahan makanan yang mereka konsumsi berkualitas rendah dan sedikit.

Lingkaran Setan Kemiskinan

Diatara beberapa kajian kemiskinan, yang berusaha memahami kemiskinan, ada teori yang melihat bahwa kemiskinan itu merupakan mata rantai yang tak terputus. Metaforanya adalah lingkaran setan kemiskinan. Sebelum sampai pada hal itu beberapa hal yang diidentifikasi sebagai penyebab kemiskinan adalah melihatnya paradigma keekonomian. Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (2004), mencoba mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Kuncoro, 2004, yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan.

Teori "Lingkaran Setan Kemiskinan", terjemahan dari "*Vicious Circle Of Poverty*" yaitu konsep yang mengadaikan suatu konstelasi yang melingkar dan daya-daya yang cenderung beraksi dan beraksi satu sama lain secara demikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Teori itu menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dinegara-negara sedang berkembang yang umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Bertolak dari teori inilah kemudian dikembangkan teori-teori ekonomi pembangunan, yaitu teori yang telah dikembangkan lebih dahulu di Eropa Barat yang

menjadi cara pandang atau paradigma untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah ekonomi di negara-negara sedang berkembang, misalnya India atau Indonesia.



Diagram Lingkaran Kemiskinan (Google.com)

Pada hasilnya teori itu mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Karena rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseorang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat sehingga kapitalnya tidak efisien (boros). Untuk bisa membangun, maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada titik lingkaran rendahnya produktivitasnya, sebagai sebab awal dan pokok. Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi demand yaitu dengan meningkatkan pendapatnya. Hal ini akan berdampak kepada permintaan meningkat dan investasi juga meningkat maka modal menjadi efisien. Dengan demikian produktifitas dapat meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kajian pustaka. Berkaitan dengan hal itu, Nazir (2005: 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh. Artinya peneliti mengambil data – data yang sifatnya skunder untuk dianalisis sesuan dengan kebutuhan untuk menjawab problema yang diajukan dalam riset ini. Kemiskinan menjadi big issue yang harus di cari jalan keluarnya. Data – data tentang kemiskinan dari BPS diinteraksikan dengan data data tentang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dari “dialog” dua data tersebut didapatkan irisan yang pada akhirnya dipahami sebagai *way out* atau *exit strategy* sebagai hasil dari kajian teoretik ini.

DISKUSI

Kemiskinan Di Indonesia

Lebih dari 28 juta orang di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan banyak lagi yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar. Di Papua dan Papua Barat, tingkat kemiskinan dua kali rata-rata nasional. Antara 2002 dan 2013, ketimpangan pendapatan meningkat 24 persen. Akses terhadap layanan dasar masih rendah, dengan 68 persen terutama mereka yang berada di pusat-pusat perkotaan.



Tabel Jumlah Penduduk Miskin, (Sumber BPS, 2019)

Pada bulan ini BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin per Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,42%. Ketika data diambil untuk bulan September 2019 belum turun. Maka jika kita bandingkan antara bulan September 2018 dengan Maret 2019 ada penurunan penduduk miskin sejumlah 0,25 %. Maka dapat dikatakan dalam dua tahun terakhir terdapat penurunan angka kemiskinan. Sementara itu, bila dilihat dari sebaran penduduk miskinnya, dalam hal ini adalah antara desa dan kota, BPS juga merilis data aktual sebagaimana terdapat di bawah ini. Dari tabel terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2019 sebesar 9,99 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 15,15 persen.



Tabel Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau dan Sebaran Desa-Kota (Sumber BPS, 2019)

Kriteria Pengukuran Kemiskinan Menurut BKKBN

Pada awal pemerintahan Orde Baru, data yang dipakai pemerintah, termasuk data keluarga, terpecah di masing-masing departemen sesuai dengan kepentingannya. Sistem dan prosedurnya pun berbeda-beda antara satu departemen dan departemen lainnya sehingga sulit untuk digabungkan menjadi data nasional. Kemudian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional secara khusus mencatat dan melakukan pemantauan keluarga di Indonesia dan hasilnya dikumpulkan dalam satu pangkalan data yang bersifat nasional. Sistem pendataan ini dilakukan secara konsisten dengan pelaporan bulanan dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kepada BKKBN Pusat, antara lain, tentang data jumlah pengguna kontrasepsi.

Pada 1994 BKKBN menambah dua bagian dalam surveinya, yaitu ukuran kesejahteraan keluarga dan karakteristik demografi keluarga. Bagian kesejahteraan keluarga digunakan untuk penargetan keluarga miskin yang dibagi dalam lima kategori kesejahteraan, yaitu keluarga prasejahtera (Pra-KS), keluarga sejahtera 1 (KS1), keluarga sejahtera 2 (KS2), keluarga sejahtera 3 (KS3), dan keluarga sejahtera 3 plus (KS3 Plus).

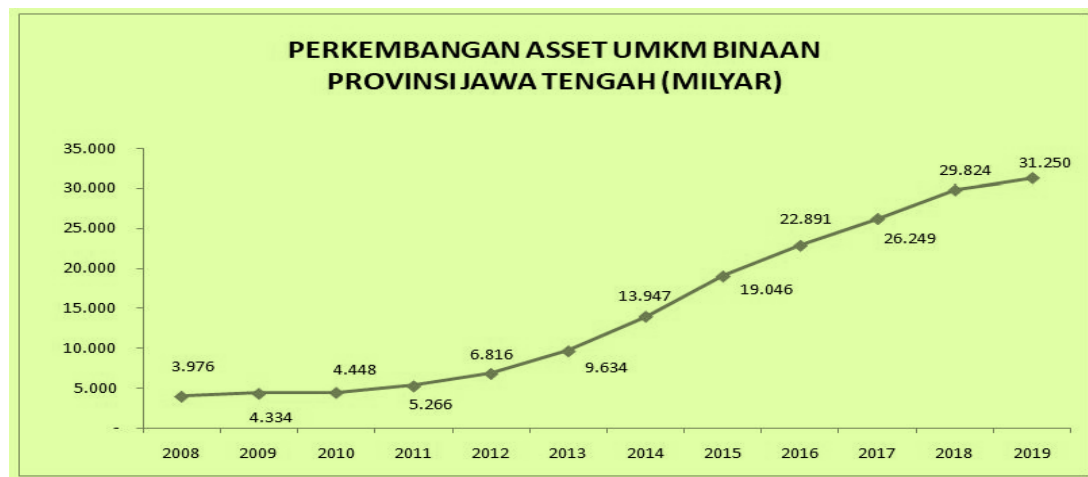
Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, yaitu: (1). anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya; (2). seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari; (3). seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian; (4). bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah; (5). bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan; (6). anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur; (7). keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu; (8). setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun; (9). tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni; (10). ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir; (11). tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap; (12). ada anggota keluarga berumur 10–60 tahun yang tidak bisa baca-tulis; (13). ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah; (14). jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi; (15). keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya; (16). sebagian penghasilan keluarga ditabung; (17). keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi; (18). keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat; (19). keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan; (20). keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah; (21). anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal; (22). keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan (23) minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal.

Sebuah keluarga dikategorikan sebagai Pra-KS bila belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator 1 hingga 5, KS1 bila memenuhi indikator 1 hingga 5, KS2 bila memenuhi indikator 1 hingga 14, KS3 bila memenuhi indikator 1 hingga 21, dan dikategorikan KS3 Plus bila memenuhi seluruh indikator 1 hingga 23. Pendataan berdasarkan kriteria tersebut dilakukan secara berjenjang. Kader desa, pembantu pembina keluarga berencana desa (PKBD), dan sub-PPKBD mendata keluarga di tingkat desa. Kemudian penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PLKB) membuat rekapitulasi hasil pendataan tersebut untuk dilaporkan ke tingkat kecamatan. Di

tingkat kecamatan pengawas PLKB membuat rekapitulasi dari data desa-desa yang ada di wilayahnya, kemudian petugas di tingkat kabupaten/kota mengolah data yang diperoleh dari kecamatan-kecamatan. Pada saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998, BKKBN menggolongkan keluarga miskin menjadi Keluarga Prasejahtera Plus (KPS+), yakni keluarga yang memenuhi kriteria KPS ditambah lima kriteria lainnya, yaitu: (i) kepala keluarga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK); (ii) anak putus sekolah; (iii) tidak mampu berobat bila sakit; (iv) tidak mampu makan dua kali sehari; dan (v) tidak mampu mengonsumsi lauk-pauk yang berprotein. Data BKKBN ini telah digunakan baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta untuk penargetan programnya seperti Program Takesra/Kukesra, dan GN-OTA. Bahkan pada saat krisis ekonomi 1997/1998, data BKKBN digunakan untuk penargetan program-program JPS, misalnya, Program Operasi Pasar Khusus Beras oleh Badan Urusan Logistik .

Keluar Dari Kemiskinan Dengan UMKM

UMKM dianggap sebagai cara alternatif untuk mengatasi beberapa masalah sosial ekonomi yang membingungkan beberapa negara saat ini, terutama masalah pengangguran tinggi dan kemiskinan. UMKM adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam perekonomian. Pengembangan UMKM adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan melalui pelatihan terstruktur dan program pembangunan kelembagaan yang difokuskan pada individu yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang dan terbelakang di dunia adalah kemiskinan. Sudah begitu endemik sebagai akibat tingginya tingkat pengangguran yang menjadi ciri utama negara berkembang.



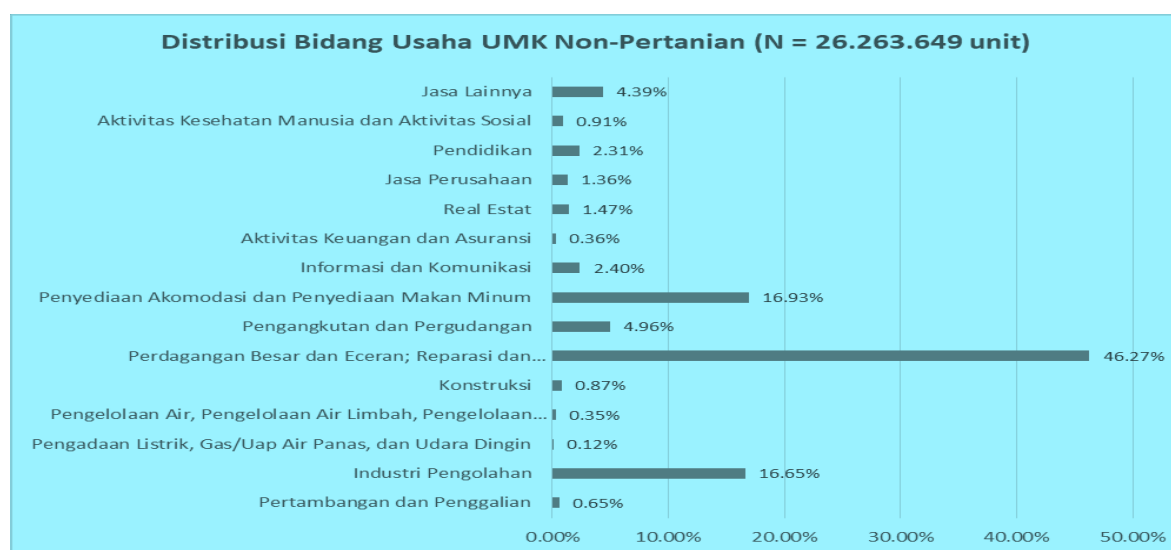
Data Pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah, Sumber : Deperinkop Jawa Tengah

Sebagai ilustrasi, kita bisa mengambil apa yang terjadi di Jawa Tengah. Data diatas memperlihatkan adanya pertumbuhan jumlah UMKM yang menjadi binaan pemerintah. Jika dibaca maka pertambahan tertinggi terjadi ketika tahun 2013 hingga tahun 2014 dengan jumlah 4131 unit usaha. Untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 juga terjadi peningkatan yang baik, yakni pada angka 3575 buah unit usaha. Pertumbuhan unit usaha yang “flat” dalam

kurun satu dekade lebih ini terjadi tahun 2009 hingga 2010 yang hanya 114 unit usaha saja.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai UMKM memiliki peranan yang sangat vital dan strategis dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Tumbuhnya UMKM menjadikan sumber kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, umkm banyak menyerap tenaga kerja karena itu UMKM memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan. UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh jika dibandingkan sektor lain.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. U M K M sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan. Karena sekitar 60 - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dengan adanya peraturan yang menjadi payung hukum, gerak UMKM menjadi semakin leluasa. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Di dalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari data diatas memperlihatkan sumbangan sktor non pertanian, dimana selama ini sektor pertanian diasumsikan berkontribusi signifikan dalam sektor usaha UMKM ini. Jika kita cermati maka sektor perdagangan menempati posisi tertinggi dengan 46,27%, disusul kemudian sektor akomodasi – makan/minum dan industri pengolahan yang masing – masing adalah 16, 93% dan 16,65 %. Sektor terkecil terjadi pada unit usaha pengadaan listrik, gas pana dan udara dingin yang hanya sebesar 0.12% saja. Hal itu mengindiaksikan bahwa selain sektor pertanian, perdagangan memberikan gambaran betapa sektor tersebut

Tabel Posisi Kredit UMKM pada Bank Umum (miliar rupiah), Tahun 2018-2019

Rincian	2017	2018
UMKM		
Lapangan Usaha		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75.744	89.199
Pertambangan dan Penggalian	5.264	6.034
Industri Pengolahan	86.775	95.998
Pengadaan Listrik dan Gas	2.899	3.789
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.334	1.456
Konstruksi	53.993	63.594
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	451.725	482.635
Transportasi dan Pergudangan	25.262	28.954
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.338	34.708
Informasi dan Komunitas	3.051	6.439
Jasa Keuangan dan Komunikasi		
Real Estate	14.404	15.744
Jasa Perusahaan	27.987	31.213
Administrasi Pemerintahan Pertanian dan Jaminan Sosial Wajib	227	180
Jasa Pendidikan		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	7.690	8.664
Jasa Lainnya	40.405	47.601
Tidak Teridentifikasi	14	1
Jenis Penggunaan		
Modal Kerja	623.481	697.388
Investasi	233.476	244.999
Tidak Teridentifikasi	0	0
Skala Usaha		
Mikro	195.621	221.409
Kecil	255.504	282.774
Menengah	405.832	435.225
Kredit dengan Peminjaman Tertentu 2		
Mikro	6.384	67.230
Kecil	23.366	42.643
Menengah	2.188	9.727
Jasa Pendidikan		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	7.650	8.664
Jasa Lainnya	40.405	47.601
Tidak Teridentifikasi	14	1
Jenis Penggunaan		
Modal Kerja	623.481	697.388
Investasi	233.476	244.999
Tidak Teridentifikasi	0	0
Skala Usaha		
Makro	195.621	221.409
Mikro	255.504	282.774
Menengah	405.832	438.205
Kredit dengan Pinjaman Tertentu		
Makro	6.364	67.230
Mikro	23.366	42.643
Menengah	2.158	9.727

Sumber : Bank Indonesia

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. etika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Bisnis UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Posisi kredit UMKM pada bank umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

UMKM bisa menjadi alternatif meningkatkan taraf hidup masyarakat di dunia. Masyarakat-masyarakat yang termasuk kategori miskin diberikan pelatihan dan bantuan modal untuk menjalankan UMKM . UMKM adalah pelopor kumpulan ide-ide baru dari proses baru yang mempercepat peningkatan berdasarkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Peran usaha kecil dan menengah diakui di seluruh dunia karena kontribusi unik mereka terhadap pembangunan ekonomi. Baik negara maju maupun negara yang dalam proses pembangunan menyadari bahwa UMKM dan pengusaha memainkan peran penting dalam perkembangan industri suatu negara. Jadi tidak mengherankan bahwa para ahli strategi politik sering berpikir bahwa UMKM dapat menjadi "benih" kebangkitan ekonomi.

Apabila program UMKM di negara Indonesia dijalankan dengan baik dan didukung oleh pemerintah tentu saja dapat menjadi penggerak perekonomian serta dapat menekan angka kemiskinan dikarenakan masyarakat menjadi mandiri. Strategi pemberdayaan UMKM antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM memang sejak empat puluh tahun terakhir ini merupakan kegiatan sentral yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa. Pendidikan formal, peningkatan keterampilan atau profesionalisme merupakan upaya dalam meningkatkan kelompok UMKM. Adanya indikasi, bahwa sebagian UMKM tumbuh motivasi keterpaksaan karena mereka tidak mendapat lapangan kerja atau belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai. Dengan demikian berbagai upaya yang telah dilakukan sendiri oleh UMKM antara lain adalah dengan belajar sendiri-sendiri (otodidak) atau ikut magang pada usaha sejenis yang telah ada sebelumnya.
2. Perijinan usaha UMKM. Penataan dan penyempurnaan peraturan daerah (Perda) perlu dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM. Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM merupakan satu-satunya solusi yang dapat disarankan, karena UMKM tidak dapat melakukan upaya apapun selain mengeluarkan biaya (yang relatif tinggi) untuk mengatasi masalah perijinan.
3. Peningkatan permodalan. Peningkatan permodalan bagi UMKM dilakukan antara lain melalui program pengembangan berbagai skim perkreditan untuk UMKM dan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro. Hasil kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM dan Koperasi tahun 2006 di Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa pada

umumnya penerima bantuan perkuatan adalah mereka yang sudah berusaha disuatu bidang usaha atau berpengalaman rata-rata 2,3 tahun. Sebagian besar UMKM (68 %) tidak memiliki modal sendiri, tetapi menggunakan modal pinjaman dari pihak lain. Penghasilan yang diperoleh dari usaha yang dilaksanakan cukup menguntungkan dengan margin rata-rata 62,1 % dari modal per tahun. Oleh karena bantuan perkuatan yang diterima UMKM jumlahnya relatif kecil (rata-rata Rp 1,94 juta), maka dana tersebut baru cukup untuk menghilangkan (mensubstitusi) ketergantungan pada sumber permodalan lain (sebagian dari rentenir). Namun demikian, dengan adanya bantuan perkuatan sebesar Rp 1,94 juta, omzet UMKM meningkat dari rata-rata Rp 44,429 juta, menjadi Rp 53,489 juta, atau rata-rata bertambah sebesar Rp 9,059 juta (20,91%) . Strategi UMKM Dalam Menghadapi Iklim Usaha Yang Tidak Kondusif (Jannes Situmorang) 13,436 juta per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa laba UMKM bertambah sebesar Rp 2.941 juta (27,68 %) (Harahap, 2013).

4. Peningkatan kualitas teknologi. Salah satu faktor yang menghambat program ini adalah prosedur pengajuan dan pengiriman barang ke daerah yang banyak memakan waktu (terlalu lama) dengan banyak pos pemberhentian. Untuk mempercepat proses pengiriman sebaiknya diberikan dalam bentuk uang karena harga barang yang dikirim bisa lebih mahal dari pada dibeli di lokasi UMKM calon pengguna. Satu lagi masalah yang perlu diperhatikan adalah kesiapan unsur-unsur pendukungnya, seperti genset harus dilengkapi dengan suku cadang yang secara kontinyu harus diganti. Demikian juga kesiapan SDM pengguna (operator), persiapannya harus dilakukan jauh-jauh hari, tetapi ini semua memang sangat sulit karena untuk proses pengajuannya saja sudah memakan waktu yang cukup panjang. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah teknologi yang digunakan tidak mematikan teknologi tradisional dari pengusaha lain yang juga UMKM sehingga tidak memperbesar pengangguran Pengembangan teknologi produksi tidak harus selalu diorientasikan pada perkembangan teknolog dengan mempertimbangkan adanya pengembangan teknologi oleh masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan bagian realitas masyarakat kita dan menjadi bagian penting dari permasalahan dari pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah. Kemiskinan akan hadir dengan kuantitas yang luar biasa besarnya seiring dengan tidak meratanya pembangunan. Kemiskinan tidak dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi dan transportasi. Peran UMKM dinilai sangat mendukung untuk mengurangi kemiskinan dan dibuktikan UMKM menjadi program pemerintah yang mempilari perekonomian Indonesia yang kokoh.

Tumbuhnya UMKM sebagai sumber kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan banyak menyerap tenaga kerja, dengan demikian UMKM memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Selama ini pelaku UMKM masih minim dalam menembus pemasaran nasional maupun internasional. Peran strategis pemerintah dalam memfasilitasi UMKM terhadap penataan UMKM belum maksimal di lakukan karena

itu UMKM tidak akan pernah berhenti pada capaian maupun kontribusi produk hasil UMKM terhadap PDB Indonesia, namun lebih dari itu diperlukan aspek penataan sistem manajemen yang diterapkan pada pelaku UMKM. Aspek manajemen perlu ada campur tangan pemerintah untuk menghasilkan tenaga terampil baik dari produksi dan pemasaran produk UMKM itu sendiri.

Beberapa poin penting rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan UMKM di Indonesia, antara lain: (1). Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus berdasarkan kondisi dan permasalahannya di masing masing daerah. (2) Menyusun database UMKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UMKM agar data UMKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain. (3) Perlindungan terhadap desain produk yang dihasilkan UMKM dengan mempermudah hak paten. (4) Meningkatkan dukungan dalam pengembangan produktivitas UMKM (contohnya pengembangan inovasi, pelatihan manajerial dan tenaga kerja) melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UMKM (5) Pengoptimalan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pemasaran dan dilakukan kerja sama antara lembaga bisnis dengan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga riset maupun lembaga keuangan, dan menyusun kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM selain *e-commerce*, terutama dalam penggunaan program *software* yang mendukung kinerja UMKM. (6) Memperkuat dan meningkatkan partisipasi UMKM melalui kerja sama yang dilakukan antara UMKM dan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed and Cruz. 2017. *On The Impact of Demographic Change on Economic Growth and Poverty*. Article in *Agriculture and Food Security*. pp 1-8.
- Anekwe Rita Ifeoma, Ndubuisi-Okolo Purity dan Attah Emmanuel Yusuf. 2018. *Effect of Entrepreneurship Development on Poverty Alleviation in Nigeria*. *Journal of Business and Management*. Volume 20, Issue 2. Ver. X (February. 2018), pp 80-87
- Bramantyo Djohanputro. 2006. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. PPM. Jakarta. pp 85
- Budiman Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Debraj Ray. 1998. *Development Economics, Chapters 1 6, 17 and 18*. Princeton University
- Duong, N. B., and Trinh, D. H. 1999. *Identification of Poverty in Vietnam Health and Wealth in Vietnam, An Analysis of Household Living Standards*.
- Gideon DA, Robert A, Dennis E. 2018. *Agricultural Extension and its Effects on Farm Productivity and Income: Insight from Northern Ghana*. Article in *Agriculture and Food Security*. pp 1-9
- Harahap, Mailina. 2013, *Analisis pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerupuk Tempe di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 13 No. 01 Oktober 2013.
- Hikmat Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora. Bandung

- Kuncoro, M. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- Majeed, M. T. (2016). *Economic Growth and Income Inequality Nexus: An Empirical Analysis for Pakistan*. Kashmir Economic Review, 25 (1), 1-12.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pegg, S. 2003. *Poverty Reduction or Exacerbation Indianapolis, Enviromental Defense*.
- Plummer Ken. 2011. *Sosiologi The Basic*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Portes, A. 1998. *Sosial Capital : Its Origins and Application in Contemporary Sociology*. Annual Review of Sociology, pp 24
- Reitsma, H. A., and Kleinpenning, J. M. G. 1991. *The Third World in Perspective*. Assen, Van Gorcum.
- Sachs, J. 2005. *The End of Povert, How we can make it happen in our lifetime*. London, Pinguin Books
- Sangaji, M. 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. Perekonomian Indonesia, Deskripsi. Preskripsi dan Kebijakan*. Yustika Malang, bayu Media Publishing.
- Simon and Esabele. 2017. *Financial Inclusion and Stability in MENA: Evidence from Poverty and Inequality*.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta
- Wilantara Rio. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Refika Aditama. Bandung
- Yang Zhou et al. 2017. *Targeted Poverty Alleviation and Land Policy Innovation: Some Practice and Policy Implications from China*
- Zaopeng et al. 2017. *Understanding the Inconsistent Relationships between Socioeconomic Factors and Poverty Incidence Across Contiguous Poverty-Stricken Regions in China: Multilevel modelling*
- https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20190715114150